



**BUPATI BOMBANA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM  
DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna lebih meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan di bidang kepegawaian, perlu mengatur Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Hukum dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Hukum Dan NASKAH Dinas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naska Dinas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Dearah;
20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002,tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana.
2. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai Hukum penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Bombana.
5. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Produk Hukum dan Naskah Dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari Bupati kepada pejabat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
7. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
9. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

- 10.Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 11.Surat pengantar adalah Naskah Dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

**BAB II  
PENDELEGASIAN**

**Pasal 2**

Pendelegasian wewenang penandatanganan produk hukum dalam bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

**Pasal 3**

Pendelegasian wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

**BAB III**

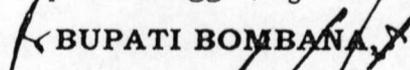
**KETENTUAN PENUTUP**

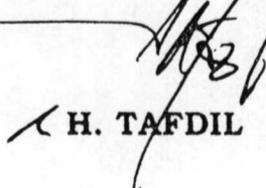
**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 19 Mei 2014

  
BUPATI BOMBANA

  
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal,

2014

**SEKRETARIS DAERAH**

**H. RUSTAM SUPENDY**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR

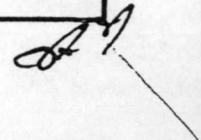
**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA**

Tanggal : 19 Mei 2014

Nomor : 13 Tahun 2014

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
PRODUK HUKUM DAN PETIKANNYA DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BOMBANA**

| <b>NO.</b> | <b>JENIS PRODUK HUKUM</b>                            | <b>PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG</b> | <b>UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN / ESELON / PEGAWAI HONORER DAERAH</b> | <b>KETERANGAN</b>                                     |
|------------|--|--|--|---|
| <b>I</b>   | <b>II</b>  | <b>III</b>                                   | <b>IV</b>  | <b>V</b>  |
| 1          | Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat                   | Kepala BKD                                   | PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I                                      | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana        |
| 2          | Keputusan Peninjauan Masa kerja Pegawai Negeri Sipil | Sekretaris Daerah                            | PNS Golongan III, II dan I   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana        |
| 3          | Keputusan Bebas Tugas                                | Sekretaris Daerah                            | PNS Golongan IV dan III  | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana        |
|            |  | Kepala BKD                                   | PNS Golongan II dan I  | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana        |
| 4          | Keputusan Pemindahan PNS antar Satuan Kerja          | Kepala BKD                                   | PNS Golongan IV, III, II dan I   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana        |
| 5          | Keputusan Tugas Tugas Belajar dan Izin Belajar       | Kepala BKD                                   | PNS Golongan IV, III, II dan I   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana        |
| 6          | Petikan Keputusan Pemindahan PNS antar Satuan Kerja  | Kepala BKD                                   | PNS Golongan IV, III, II dan I   | Bagi PNS (staf) di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana |



| I  | II   | III               | IV                                | V   |
|----|--|-------------------|-----------------------------------|---|
| 7  | Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil  | Sekretaris Daerah | CPNS Golongan III, II dan I       | Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana   |
| 8  | Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil                           | Sekretaris Daerah | PNS Golongan III, II dan I        | Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana  |
| 9  | Petikan Keputusan Pengangkatan dalam/ Pemberhentian dari Jabatan Struktural                                      | Sekretaris Daerah | Pejabat Struktural Eselon II      | Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana  |
|    |  | Kepala BKD        | Pejabat Struktural Eselon III, IV | Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana  |
| 10 | Petikan Keputusan Pengangkatan dalam / Pemberhentian dari Jabatan Fungsional                                     | Kepala BKD        | PNS Golongan IV, III, dan II      | Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana  |
| 11 | Petikan Keputusan Pengangkatan dalam / Pemberhentian dari Jabatan Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri | Kepala BKD        | PNS Golongan IV, III, dan II      | Bagi Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana |
| 12 | Petikan Keputusan Pengangkatan / Pemberhentian Pegawai Honorer Daerah  | Kepala BKD        | PHTT                              | Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana                      |
| 13 | Keputusan Pemindahan Pegawai Honorer Daerah  | Kepala BKD        | PHTT                              | Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana                      |

BUPATI BOMBANA,

H. TAEDIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA

Tanggal : 19 Mei 2014

Nomor : 13 Tahun 2014

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BOMBANA**

| NO. | JENIS SURAT DINAS  | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG | UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN / ESELON / PHTT                           | KETERANGAN  |
|-----|--|---------------------------------------|---|---|
| I   | II   | III                                   | IV  | V   |
| 1   | Penandatanganan Formulir Penetapan NIP CPNS  | Kepala BKD                            | CPNS Golongan III, II dan I   | Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana   |
| 2   | Permintaan pengujian kesehatan kepada Dokter penguji tersendiri/ Tim Penguji Kesehatan | Kepala BKD                            | CPNS Golongan III, II dan I   | Bagi CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana         |
|     |  |                                       | PNS Golongan IV, III, II, I dan CPNS Golongan III, II, I                      | Bagi PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kab. Bombana untuk keperluan kepegawaian lainnya |
| 3   | Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)                             | Sekretaris Daerah                     | Pejabat Struktural Eselon II. b   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana.   |
|     |  | Kepala BKD                            | Pejabat Struktural Eselon III   | Bagi PNS di Lingkungan Kantor dan Kecamatan.  |
|     |  | Asisten Administrasi                  | Pejabat Struktural Eselon III, IV, PNS Golongan IV PNS Golongan III, II dan I | Bagi PNS di Lingkungan Setda Kab. Bombana.  |
|     |  | Kepala Badan/Kantor                   | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV                         | Bagi PNS di Lingkungan Badan dan kantor   |
|     |  | Sekretaris Badan/Kantor.              | PNS Golongan III, II dan I  | Bagi PNS di Lingkungan Badan dan kantor   |
|     |  | Sekretaris DPRD                       | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV                         | Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD   |

| I | II | III   | IV  | V   |
|---|----|---|---|---|
|   |    | Kabag Umum Sekretariat DPRD                           | PNS Golongan III, II dan I                                      | Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD                 |
|   |    | Kepala Dinas  | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV           | Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan) |
|   |    | Sekretaris Dinas                                      | PNS Golongan III, II dan I                                      | Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan) |
|   |    | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga         | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV non Guru  | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan                 |
|   |    |   | Kepala SMA / SMK, SMP dan Guru DPK Golongan IV                  | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan                 |
|   |    | Kabag. TU pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga | PNS Golongan III, II dan I                                      | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan                 |
|   |    |   | Guru DPK Golongan III dan II                                    | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan                 |
|   |    | Kepala SMP  | PNS Golongan IV, III, II dan I pada SMP                         | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan                 |
|   |    | Kepala SMA/SMK  | PNS Golongan IV, III, II dan I pada SMA/SMK                     | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan                 |
|   |    | Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga    | PNS Golongan IV, III, II dan I                                  | Bagi PNS di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan        |
|   |    | Direktur RSUD   | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV           | Bagi PNS di Lingkungan RSUD                             |
|   |    | Sekretaris RSUD                                       | PNS Golongan III, II dan I                                      | Bagi PNS di Lingkungan RSUD                             |
|   |    | Kepala Kantor   | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I | Bagi PNS di Lingkungan Kantor                           |
|   |    | Camat   | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I | Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kepala Kelurahan   |
|   |    | Lurah   | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I | Bagi PNS di Lingkungan Kelurahan                        |

| I | II   | III  | IV  | V   |
|---|--|--|---|---|
| 4 | Surat Izin Cuti:<br><br>Cutu Tahunan, Cutu Sakit, Cutu Bersalin, Cutu Besar dan Cutu karena Alasan Penting | Sekretaris Daerah                                  | Pejabat Struktural Eselon III   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana.                   |
|   |  | Asisten Administrasi                               | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV                                    | Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah.                        |
|   |  | Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.    | PNS Golongan III, II, I dan PHTT  | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Sekretariat Daerah.               |
|   |  | Kepala Dinas                                       | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV                                    | Bagi PNS di Lingkungan Dinas (kecuali Dinas Pendidikan ).         |
|   |  | Sekretaris Dinas                                   | PNS Golongan III, II, I dan PHTT  | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Dinas (kecuali Dinas Pendidikan). |
|   |  | Kepala Badan                                       | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV                                    | Bagi PNS di Lingkungan Badan.                                     |
|   |  | Sekretaris Badan                                   | PNS Golongan III, II, I dan PHTT  | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Badan.                            |
|   |  | Kepala Dinas Pendidikan                            | Pejabat Struktural Eselon IV, Pengawas SMA / SMK, SMP dan Kepala SMA / SMK dan SMP. | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan.                          |
|   |  |  | PNS Golongan IV, III, II, I dan PHTT  | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Dinas Pendidikan.                 |
|   |  | Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga  | Kepala SD, PNS Golongan IV, III, II, I dan PHTT                                     | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan.        |
|   |  | Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga | Pejabat Struktural Eselon IV  | Bagi PNS di Lingkungan SMA / SMK dan SMP                          |
|   |  | Kepala SMA / SMK dan SMP                           | PNS Golongan IV, III, II, I dan PHTT  | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan SMA / SMK dan SMP                 |
|   |  | Sekretaris DPRD                                    | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV                                    | Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD.                          |

| I | II | III                          | IV  | V   |
|---|----|------------------------------|---|---|
|   |    | Kabag. Umum Sekretariat DPRD | PNS Golongan III, II, I dan PHTT  | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Sekretariat DPRD.   |
|   |    | Direktur RSD                 | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV                        | Bagi PNS di Lingkungan RSD.   |
|   |    | Kepala Kantor                | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II, I serta PHTT | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Kantor.   |
|   |    | Camat                        | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II, I serta PHTT | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Kecamatan serta Pejabat Struktural Eselon IV di Kelurahan.  |
|   |    | Lurah                        | PNS Golongan IV, III, II, I dan PHTT                                    | Bagi PNS dan PHTT di Lingkungan Kelurahan   |
|   |    |                              |   | <p><b>Catatan :</b></p> <p>1. Khusus untuk Cuti Karena Alasan Penting untuk menunaikan Ibadah Haji atau menjalankan kewajiban agama masih menjadi kewenangan Bupati.</p> <p>2. Khusus Cuti Tahunan Mebuat Permohonan Persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>3. Berdasarkan PP 24 Tahun 1976, khusus guru tidak berhak atas cuti tahunan.</p> |

| I                                 | II  | III  | IV  | V  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|
| 5                                 | Surat Izin menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | Asisten Administrasi                               | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV<br>PNS Golongan III, II dan I | Bagi PNS di Lingkungan Setda Kab. Bombana<br>Bagi PNS di Lingkungan Setda Kab. Bombana |
|                                   |   | Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda.          | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I                 | Bagi PNS di Lingkungan Setda Kab. Bombana.   |
|                                   |   | Kepala Badan dan Kantor                            | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I                 | Bagi PNS di Lingkungan Badan dan Kantor  |
|                                   |   | Kepala Dinas                                       | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I                 | Bagi PNS di Lingkungan Dinas (Kecuali Dinas Pendidikan)                                |
|                                   |   | Sekretaris DPRD                                    | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan IV III, II dan I                 | Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD  |
|                                   |   | Direktur RSD                                       | Pejabat Struktural Eselon IV, PNS Golongan IV III, II dan I                         | Bagi PNS di Lingkungan RSD   |
|                                   |   | Kepala Kantor                                      | Pejabat Struktural Eselon IV dan PNS Golongan IV III, II dan I                      | Bagi PNS di Lingkungan Kantor  |
|                                   |   | Camat  | Pejabat Struktural Eselon III, IV   | Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan   |
|                                   |   |  | PNS Golongan IV III, II dan I   | Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan   |
|                                   |   | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga      | Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.   | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan  |
|                                   |   |  | Kepala SMA / SMK dan SMP.   | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan  |
|                                   |   |  | Kepala SD / SDLB, TK Negeri   | Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan  |
|                                   |   | Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | PNS Golongan IV, III, II dan I  | Bagi PNS di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan.                                      |
| Kepala SMA/SMK, MP, SD / SDLB, TK | PNS Golongan IV, III, II dan I                              | Bagi PNS di Lingkungan SMA/SMK, SMP, SD / SDLB, TK |   |  |

| I  | II   | III               | IV   | V  |
|----|--|-------------------|--|--|
| 6  | Surat Izin Belajar   | Kepala BKD        | PNS Golongan IV, III, II dan I   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                                 |
| 7  | Surat Pernyataan Pelantikan  | Sekretaris Daerah | Pejabat Struktural Eselon II. b  | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                                 |
|    |  | Kepala BKD        | Pejabat Struktural Eselon III, dan IV                                      | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                                 |
|    |  |                   | Pengawas   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                                 |
|    |  |                   | Kepala SMA / SMK, SMP, SD / SDLB dan TK Negeri                             | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                                 |
| 8  | Surat Pengusulan Mutasi Kenaikan Pangkat                                       | Kepala BKD        | PNS Golongan IV/b, IV/a, III, II dan I                                     | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana yang diusulkan Kenaikan Pangkat |
| 9  | Surat Pengajuan Permintaan Kartu Pegawai, Karis/Karsu dan Taspen               | Kepala BKD        | PNS Golongan IV, III, II dan I   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                                 |
| 10 | Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat                                      | Kepala SKPD       | PNS Golongan IV/a dan IV/b   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana yang diusulkan Kenaikan Pangkat |
|    |  | Kepala BKD        | PNS Golongan III, II dan I   | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana yang diusulkan Kenaikan Pangkat |
| 11 | Rekomendasi Usulan Kenaikan Pangkat  | Kepala SKPD       | Pejabat Struktural Eselon III, IV, PNS Gol, IV, III, II dan PNS Golongan 1 | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana yang diusulkan Kenaikan Pangkat |
| 12 | Legalisasi Foto Copy berkas-berkas yang berkaitan dengan usul kenaikan pangkat | Kepala BKD        | Pejabat Struktural Eselon II, dan PNS Golongan IV                          | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                                 |
|    |  | Sekretaris BKD    | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Golongan III, II dan Golongan I  | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                                 |

| I  | II   | III               | IV                                      | V  |
|----|--|-------------------|---|--|
| 13 | Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan   | Sekretaris Daerah | Pejabat Struktural Eselon II b          | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                         |
|    |  | Kepala BKD        | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                         |
| 14 | Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional                               | Sekretaris Daerah | Pejabat Struktural Eselon II.b          | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                         |
|    |  | Kepala BKD        | Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                         |
|    |  |                   | PNS Golongan IV, III dan II             | Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bombana                         |
| 15 | Perjanjian Kerja Pegawai Honorer Daerah  | Kepala BKD        | Pegawai Honorer Daerah                  | Bagi Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana |
| 16 | Legalisasi foto copy Keputusan Pengangkatan Pegawai Honorer Daerah untuk Pengangkatan CPNS | Kepala BKD        | Pegawai Honorer Daerah                  | Bagi Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana |

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL